



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2021-2026**



**DINAS PANGAN PERTANIAN DAN  
PERIKANAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

2021

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO .....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan .....	16
2.3 Sarana Prasarana Kantor .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	44
3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5 Penentuan Isu-Isu strategis .....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	57
BAB VIII PENUTUP .....	64
Lampiran .....	65

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun oleh Tim Penyusunan Renstra merupakan dokumen perencanaan yang tersusun dari hasil serangkaian proses evaluasi dan perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Dokumen renstra ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja program pembangunan pangan, pertanian dan perikanan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo selama 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Wonosobo.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan lima tahunan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan keseluruhan aspek pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo secara utuh. Sehingga sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan terutama dengan memperhatikan dinamika yang terjadi dilapangan. Melalui evaluasi dan pengukuran capaian kinerja secara periodik dalam setiap tahun anggaran juga dapat menjadi input untuk penyesuaian/ perbaikan terhadap dokumen rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ini. Kami juga berharap ada masukan, saran untuk perbaikan Dokumen Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo kedepan.

Wonosobo, Oktober 2021

**Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Wonosobo**



**Ir. Dwiyama. SB, M.Si.**  
**NIP. 19670102 199403 1 010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang didalamnya memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

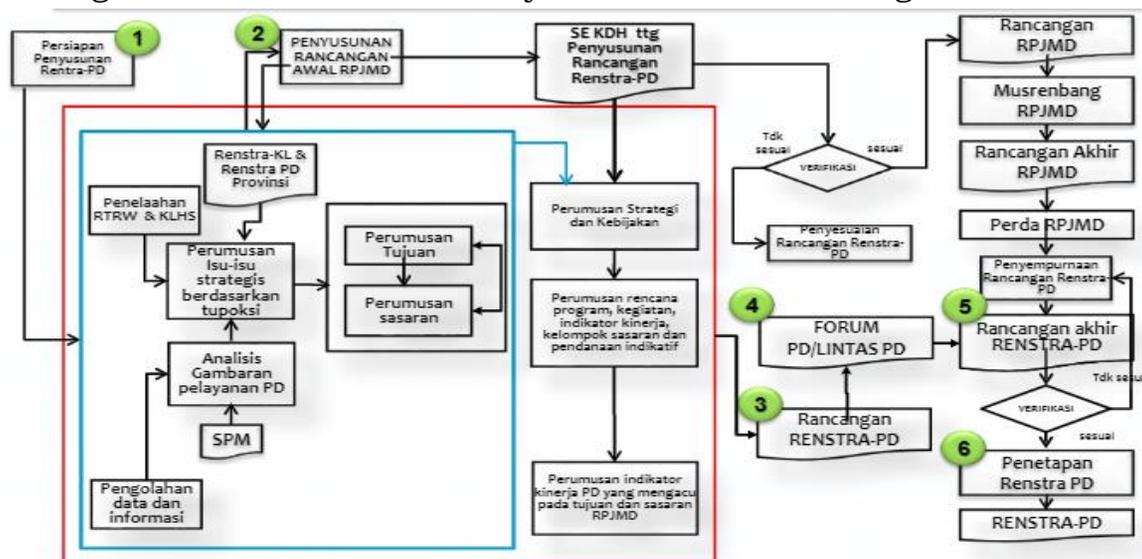
Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tersebut, menyajikan agenda pembangunan pangan, pertanian dan perikanan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan dilakukan dengan komitmen untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021 - 2026.

Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta

tahapan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar .1.1

Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo merupakan upaya mensinergikan prioritas dalam Agenda Prioritas Nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang dimuat dalam Nawacita dan mengacu pada visi Kabupaten Wonosobo yaitu **Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera**.

Visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tangguh untuk Mengurangi Kemiskinan yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Berkarakter, Berbudaya, Kreatif, Inovatif, Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Komprehensif yang Berorientasi Pada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Perkembangan Teknologi Modern.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Berkeadilan, dan Berkelanjutan untuk Menciptakan Pembangunan yang Merata.

5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Tetap Menjaga Keseimbangan dan Pelestarian Fungsi dan Keberadaannya dalam Upaya Menopang Kehidupan dan Penghidupan di Masa yang Akan Datang.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu penjabaran dari visi kedua yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tangguh untuk Mengurangi Kemiskinan yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi .” Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor utama perekonomian Kabupaten Wonosobo. Pergerakan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata pada tahun 2015-2019 sebesar 30,75%. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 sebesar 29,06% merupakan kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Meskipun sektor pertanian merupakan kontributor terbesar, namun pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin menurun, seiring dengan peningkatan sektor ekonomi lainnya seperti industri pengolahan maupun perdagangan. Berikut adalah persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Wonosobo dalam kurun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**

No	Tahun	Kontribusi Sektor Pertanian (%)
1	2015	32,6
2	2016	32,71
3	2017	30,89
4	2018	30,03
5	2019	29,06
Rata-rata		30,75

Sumber: RPJMD Kab. Wonosobo 2021-2026

Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo pada periode 2015-2019 cenderung menurun, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Merujuk pada data yang ada dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo periode Tahun 2021-2026, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wonoosbo mencapai 31,07%. Dimana pada Tahun 2020 sektor pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,83%. Selengkapnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

No	Tahun	Kontribusi Sektor Pertanian (%)
1	2016	5,46
2	2017	0,06
3	2018	1,70
4	2019	1,99
5	2020	4,83

Sumber: RPJMD Kab. Wonosobo 2021-2026

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi yaitu sebesar 161.762 orang atau 39,31% dari penduduk usia 15 tahun yang bekerja, namun setiap tahun ada kecenderungan mengalami penurunan. Tingginya kontribusi sektor dan jumlah tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian tidak berbanding lurus dengan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang terendah dibandingkan sektor lainnya yaitu hanya menyumbang 24,31%. Sebagai akibatnya kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan yang bekerja di sektor industri. Hal ini terjadi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian adalah petani berlahan sempit dengan rata-rata kepemilikan 0,2 ha dan petani penggarap/buruh tani. Namun demikian, pada masa pandemi (sejak triwulan I 2020) sektor pertanian tercatat sebagai sektor yang masih bisa tumbuh secara positif.

Sementara sektor yang lain pertumbuhannya negatif. Hal tersebut makin menegaskan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo merupakan sektor penting dalam pencapaian visi kabupaten untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh. Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian RI.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016–2021 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against*

- Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 I - 5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-DemakGrobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa I - 6 Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Ktps/RC. 020/M/05/2020/ Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo,dan
28. Peraturan Daerah Kabupten Wonosobo Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renstra SKPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah Kebijakan Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada periode Tahun 2021-2026.

## **2. Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 bertujuan:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
2. Merumuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 - 2026 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
3. Sebagai sarana untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya;
4. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja sekaligus pengendalian program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis /Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo,

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, PERTANIAN**  
**DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagainya urusan bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagainya Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan pada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- d. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- e. penyelenggaraan urusan pangan, meliputi : penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, serta penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyelenggaraan urusan pertanian, meliputi : sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan perikanan, meliputi : perikanan budidaya, penangkapan ikan dan pengawasannya di perairan umum;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- k. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Dinas; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

#### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas pokok memimpin perumusan, menetapkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

#### **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Sekretariat terdiri:

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Umum

#### **3. Bidang Bina Program dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas pokok perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan. Bidang Bina Program dan Penyuluhan terdiri:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Penyuluhan

#### **4. Bidang Ketahanan Pangan**

Mempunyai tugas pokok perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan terdiri:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
- c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### **5. Bidang Tanaman Pangan**

Mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan terdiri:

- a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
- c. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan

#### **6. Bidang Perkebunan dan Hortikultura**

Mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura. Bidang Perkebunan dan Hortikultura terdiri:

- a. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura
- c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura

#### **7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri:

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi
- b. Seksi Kesehatan Hewan
- c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

#### **8. Bidang Perikanan**

Mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan. Bidang Perikanan terdiri:

- a. Seksi Perikanan Budidaya
- b. Seksi Perikanan Tangkap
- c. Seksi Prasarana dan Sarana, Pengolahan dan Pemasaran

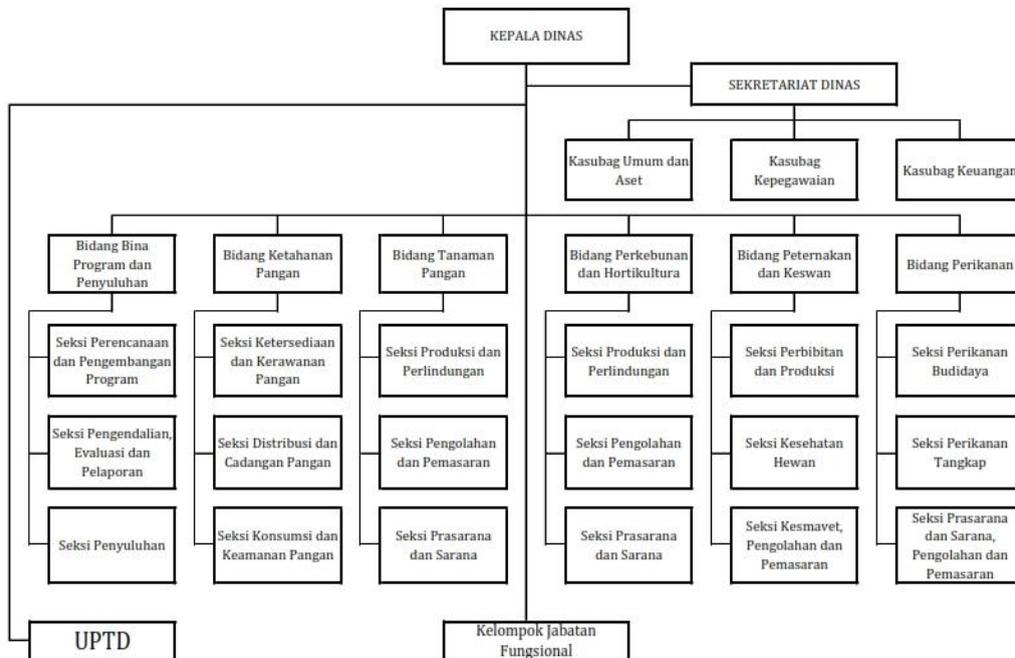
## 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. Terdiri:

- a. UPT Balai Benih Padi Sari Aji
  - b. UPT Rumah Potong Hewan (RPH)
  - c. UPT Balai Benih Ikan (BBI)
10. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1.**

### **Struktur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo**



Sumber: Lampiran Perbup No. 27 Tahun 2018

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari dukungan sumberdaya yang ada. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia pertanian, sumberdaya asset/ modal dan sumber daya yang berupa unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

### **2.2.1.Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terkait status kepegawaiannya terdiri dari 155 orang Aparatur (ASN) dan 37 orang dengan status kepegawaian Non ASN. Dari jumlah tersebut apabila diekelompokkan menurut jabatannya, diketahui sumber daya manusia terbesar Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo adalah fungsional pertanian. Selengkapannya SDM Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berdasarkan jabatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1.

Data SDM Dinas Pangan, Pertanian Kabupaten Wonosobo  
Berdasarkan Jabatan

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kasubag	2
5	Kasi	12
6	Ka UPT	2
7	Pengolah Data	2
8	Pengadministrasi Umum	12
9	Pengadministrasi kepegawaian	1
10	Pengadministrasi Perencanaan	1
11	Pramu Bakti	3
12	Pengawas Mutu Pakan	3
13	Veteriner	4
14	Pengawas Bibit Ternak	2
15	Penyuluh Petanian ASN	60
16	Penyuluh Petanian P3K	67
17	Analisis Tanah Pertanian Pangan	1

	Berkelanjutan	
18	Analisis Mutu Hasil Perikanan	1
19	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan	1
20	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1
21	Pengawas Mutu Pakan	2
22	Jabatan lain	7
JUMLAH		192

Sumber: Subag. Kepegawaian Dispaperkan 2021

Jumlah penyuluh pertanian baik yang berstatus ASN maupun Non ASN sejumlah 127 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 265 Desa/Kelurahan maka rata-rata satu orang PPL mempunyai 2-3 Desa/Kelurahan sebagai wilayah binaan. Dimana dalam satu Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 4-5 Kelompok Tani. Rata-rata penyuluh pertanian berlatar belakang pendidikan S1/ D-IV Pertanian. Sebagian kecil yang berlatar belakang Pendidikan D-III. Sehingga PPL menjadi sumber daya yang strategis dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. PPL menjadi garda depan dalam pembangunan pertanian yang bisa menjadi *window in* maupun *window out* pesan dalam konteks komunikasi pertanian.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, jumlah terbesar pegawai dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berlatar belakang Pendidikan sarjana/ S1 yang berjumlah 73 orang. Diikuti oleh pegawai dengan latar belakang Pendidikan SLTA/Sederajat sejumlah 70 orang. Sedangkan untuk yang berlatar belakang Pendidikan S.2 tercatat ada 9 pegawai. Selengkapnya data pegawai Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan latar belakang pendidikannya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel. 2.2.**  
**Data Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	9
2	S1/ D IV	73
3	D III	36
4	SLTA/ SEDERAJAT	70
5	SLTP/ SEDERAJAT	4
JUMLAH		192

*Sumber: Subag. Kepegawaian Dispaperkan 2021*

Persoalan kepegawaian pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan selain terkait peningkatan kapasitas PPL juga terkait keterbatasan jabatan-jabatan fungsional umum yang jumlahnya sangat terbatas. Sehingga beberapa pekerjaan terpaksa menggunakan sumber daya pegawai dengan jabatan fungsional khusus. Ketika pemangku jabatan fungsional khusus dibebani dengan pekerjaan tambahan/ pekerjaan administrasi seringkali justru menjadikan pelaksanaan tugas pokoknya menjadi tidak optimal. Kekosongan jabatan pada beberapa level jabatan administrasi kedepan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

### **2.2.2 Sumber Daya Aset dan Sarana Prasarana Gedung dan Bangunan**

Saat ini Dinas Pangan, Pertanian Kabupaten Wonosobo menempati kantor di Kawasan Balai Benih Sariaji, Jl. Mayjend. Bambang Sugeng yang ditempati sejak tahun 2020 kemarin. Gedung baru yang dimulai pembangunannya pada Tahun 2019 cukup representatif untuk pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. Namun demikian, Gedung baru ini belum dilengkapi prasarana kantor yang dibutuhkan. Saat ini dari Gedung yang ada baru tersedia ruang kantor untuk enam bidang, satu ruang Kepala Dinas, satu ruang sekretariat, loby yang difungsikan sebagai ruang tamu dan satu ruang pertemuan.

Prasarana pendukung seperti ruang dapur, mushola dan gudang belum tersedia. Untuk gudang saat ini masih dalam proses persiapan pembangunan dengan anggaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200 juta rupiah. Diperkirakan gudang yang sedang dibangun tersebut baru dapat memenuhi untuk kebutuhan

penyimpanan sebagian sarana prasarana kantor. Sedangkan kebutuhan tempat untuk penyimpanan alat dan mesin pertanian diperkirakan belum dapat terpenuhi. Saat ini untuk menampung alat mesin pertanian terutama yang dari pengadaan pemerintah pusat masih diletakkan di halaman kantor. Selain gudang, ruang pertemuan juga menjadi prasarana pelaksanaan tugas yang masih sangat dibutuhkan saat ini. Dengan enam bidang yang ada di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kondisi normal kebutuhan ruang pertemuan cukup tinggi. Saat ini hanya tersedia satu aula yang difungsikan sebagai ruang pertemuan. Itupun sebagian digunakan untuk musholla sementara.

Pembangunan Gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang menempati Kawasan Balai Benih Sariaji juga telah mengurangi sebagian besar prasarana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Pertanian Sariaji. Beberapa prasarana Balai Benih Sariaji yang terkena dampak pembangunan kantor baru antara lain: dua unit green haouse untuk pembibitan hortikultura, satu unit lantai jemur untuk pembenihan padi, gudang penyimpanan benih dan gedung laboratorium pertanian.

Selain menempati Gedung yang berada di Kawasan Balai Benih Sariaji, aktivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan juga dilaksanakan di UPT yang meliputi UPT Bapeluh di Ngawen, UPT Balai Benih Ikan di Kenjer, Sidojoyo, Leksono dan Sudungdewo, UPT RPH Ngasinan dan Kertek dan di 15 BPP yang ada di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonosobo. Dari 15 BPP, baru 5 BPP yang gedung kantornya menempati tanah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu BPP Kejajar, Wonosobo, Kertek, Sapuran dan Kaliwiro. Sementara 10 BPP lainnya berada di kompleks kantor kecamatan masing-masing.

### **2.3 Sarana Prasarana Kantor**

Dalam pelaksanaan tugas dukungan sarana prasarana kantor juga berpengaruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Meskipun belum semuanya terpenuhi saat ini prasarana kantor yang ada di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagian besar dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas dinas. Salah satu kendala yang dihadapi terkait penyimpanan dan pemeliharaan karena keterbatasan tempat. Berikut data prasarana kantor yang ada di

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo:

Tabel. 2.3.

Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana di Dinas Pangan,  
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

NO.	SPESIFIKASI BARANG	Keadaan (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	Almari	B	22
2	Almari Es	B	19
3	Bak Fiber	B	16
4	Camera digital	B	28
5	Container N2 Cair	B	25
6	CPU	B	2
7	Faxisimile	B	1
8	Filling Cabinet	B	44
9	Komputer	KB	47
10	Kursi	B	133
11	Laptop / Notebook	B	128
12	Megaphone	B	22
13	Meja Kayu	B	158
14	Meja/Kursi Tamu	B	5
15	Mesin Ketik	KB	8
16	Mobil dan Perlengkapannya	B	15
17	Modem	B	16
18	Monitor	B	5
19	Perahu Jukung dan Perlengkapannya	KB	10
20	Printer	B	97
21	Proyektor	B	14
22	Sepeda Motor	B	171
23	Amplifier	B	1

*Sumber: Subag. Umum Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan*

### **2.3.1. Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu : Urusan Wajib terdiri dari Urusan Pangan, dan Pilihan terdiri dari Sebagian Urusan Perikanan dan Urusan Pertanian. Kinerja layanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonoosbo periode 2016-2020 dapat dilihat dari capaian indikator

kinerja sebagai tolok ukurnya. Ada 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan meliputi:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
2. Produktivitas Tanaman Pangan;
3. Produktivitas Tanaman Perkebunan;
4. Persentase Kenaikan Populasi Ternak;
5. Persentase Kenaikan Produksi Ikan Konsumsi;
6. Persentase Komoditas Pertanian Perikanan yang Tersertifikasi;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat;
8. Nilai Evaluasi SAKIP (Mulai Tahun 2018).

**Tabel. 2.4. Capaian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor PPH	89	89	88	88	89,3	88,8	83	86	89	86,8	99,7	93,2	97,7	101,1	97,2
2	Produktivitas tanaman pangan	5,3	5,23	5,23	5,23	5,45	5,51	5,17	5,17	5,32	5,77	108	98,8	97,1	101,7	105,8
3	Produktivitas tanaman perkebunan	0,65	0,69	0,69	0,69	0,71	0,57	0,6	0,57	0,57	0,5	87,7	92,3	82,6	82,6	70,4
4	Persentase kenaikan populasi ternak	10	8,24	8,24	8,24	9,31	7,2	7,71	-0,35	-12,32	0,03	77	93,5	-4,25	-149,5	0,32
5	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	3	3,2	3,2	3,2	4,4	6	6	6	-8,85	3,3	200	187	187,5	-276,5	75
6	Persentase komoditas pertanian dan perikanan yang tersertifikasi	22	22	22	22	30	10	11	12	15	16	45	50	54,5	68,1	53,3

7	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	74	74	74	78	69	73	76	74,95	75,45	106	98,6	102,7	101,2	96,7
8	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0	0	62	62	71	0	0	62,7	64,03	74,88	0	0	109	103,2	105,4

*Sumber: LKJIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan*

Dari tabel diatas diketahui jika selama periode Tahun 2016-2021 capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo cukup variatif. Beberapa indikator kinerja dapat tercapai bahkan realisasinya melebihi target, yaitu untuk indikator produktivitas tanaman pangan. Sebagian belum tercapai dengan rasio yang tidak terlalu jauh antara target dengan realisasinya. Juga terdapat indikator kinerja yang capaiannya masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan yaitu untuk indikator populasi ternak dan produksi ikan konsumsi.

Untuk populasi ternak pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi kinerja jauh dibawah target yang ditetapkan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya populasi ayam pedaging yang cukup tinggi pada Tahun 2019 dan 2020. Sebagaimana diketahui pada tahun tersebut harga ayam pedaging relative rendah sehingga sebagian besar pelaku budidaya mengalami kerugian cukup besar dan berhenti melakukan budidaya ayam pedaging. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Wonosobo tetapi terjadi pada skala nasional di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk persentase kenaikan ikan konsumsi yang juga realisasinya cukup rendah pada tahun 2019 dan 2020 salah satu faktornya dipengaruhi menurunnya produksi ikan konsumsi dari Waduk Wadaslintang. Sebagaimana diketahui pada Tahun 2019 terjadi kematian ikan budidaya yang cukup besar di Waduk Wadaslintang karena over kapasitas serta penurunan debit air pada musim kemarau Tahun 2019. Sementara, untuk produksi ikan konsumsi di Kabupaten Wonosobo sebagian besar berasal dari Waduk Wadaslintang.

Kondisi semacam itu sangat mungkin akan terjadi pada periode lima tahun kedepan. Karena produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana juga terjadi di daerah lain sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkadang sulit dikendalikan baik karena perubahan iklim maupun daya serap pasar terhadap produk hasil pertanian dan perikanan yang mengalami penurunan. Sebagai gambaran, pada awal Tahun 2021 sub sektor peternakan sudah dihadapkan pada menurunnya populasi ayam petelur karena kenaikan biaya pakan yang cukup tinggi. Sehingga sebagaian besar pembudidaya ayam petelur di Kabupaten Wonosobo memutuskan untuk berhenti melakukan budidaya.

### **2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Untuk realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat realisasi pendanaan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada belanja tidak langsung yang digunakan untuk belanja pegawai baik gaji maupun tambahan penghasilan rata-rata pertumbuhan anggaran dalam lima tahun sebesar 3,45 persen dan pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dalam lima tahun terakhir sebesar 0,39 persen. Sedangkan untuk belanja langsung yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan, rata-rata pertumbuhan anggaran dalam lima tahun sebesar -10,1 persen atau pertumbuhan rata-ratanya negatif. Sementara, rata-rata pertumbuhan realisasinya mencapai 2,75 persen. Selengkapnya untuk data realisasi pendanaan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 2.4.**  
**Realisasi Pendanaan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-(dalam Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-(dalam Ribu)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	447.100	700.000	440.000	510.014	285.890	356.721	687.679	433.713	499.488	284.930
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.468.306	480.000	4.638.941	6.678.818	50.000	1.911.007	451.509	4.532.042	6.466.234	50.000
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50.000	350.000	226.509	525.000	-	50.000	309.129	224.234	519.035	-
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.755.000	525.000	100.000	250.000	35.000	1.702.734	494.768	59.982	186.540	-
5	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	3.223.500	2.170.000	1.700.000	3.900.000	2.813.796	3.514.710	2.103.656	1.495.889	3.446.216	2.696.059
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	150.000	100.000	100.000	100.000	125.000	147.412	96.420	98.819	93.584	123.652
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	908.167	760.000	975.000	1.450.000	1.062.015	846.222	744.642	955.610	1.418.219	255.366
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100.000	150.000	300.000	310.712	19.560	100.000	148.916	290.879	300.320	18.853

9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi	100.000	-	-	-	-	97.341	-	-	-	-
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.402.032	1.100.000	1.595.500	1.712.162	2.014.542	753.234	1.094.561	1.329.933	2.362.737	1.825.955
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-	75.000	-	-	63.260	-	63.370	-	-	41.070
12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	25.000	230.000	100.000	-	-	25.000	228.833	69.267	-
13	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	-	190.000	150.000	100.000	56.200	-	182.167	144.414	99.924	55.275
14	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	-	-	40.000	50.000	-	-	-	37.738	50.000	-
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1.469.514	1.433.214	-	-	-	1.418.462	1.408.293
	<b>Jumlah</b>	12.604.105	6.625.000	10.495.950	17.156.220	7.958.477	9.479.381	6.401.817	9.832.086	16.930.026	6.759.453

Sumber: LKJIP Dispaperkan Tahun 2016-2020

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.**

Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada dasarnya adalah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan sebagaimana menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Meliputi urusan bidang pangan, pertanian dan Sebagian urusan kelautan dan perikanan. Sampai saat ini belum ada penambahan maupun pengurangan dari urusan yang diampu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Tantangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pengembangan pelayanannya kedepan salah satunya terkait dengan pelayanan penyuluhan pertanian . Perkembangan teknologi informasi terlebih pasca pandemic Covid-19 terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks pelayanan penyuluhan pertanian paling tidak terdapat dua hal yang menjadi tantangan besar, pertama kecenderungan masyarakat termasuk petani menggunakan perangkat berbasis internet untuk memperoleh informasi termasuk informasi pertanian menuntut petugas/pegawai terutama penyuluh pertanian lapangan di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mampu mengemas informasi seputar pembangunan pertanian melalui media berbasis teknologi informasi. Bisa jadi kedepan petani makin tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan tatap muka karena mereka dapat memperoleh informasi seputar pertanian dari rumah hanya dengan *hanphone* atau media-media sosial.

Kedua, produk hasil pertanian dari daerah lain akan semakin mudah masuk ke Kabupaten Wonosobo melalui pemasaran secara online. Disatu sisi hal tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi disisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi petani lokal ketika produk yang dihasilkan belum kompetitif. Seperti diketahui, biaya pokok produksi pertanian di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi sehingga sampai dengan harga jual kurang kompetitif. Disini pelayanan penyuluhan pertanian dituntut tidak sekedar terkait teknik budidaya tetapi juga menyangkut pelayanan/pendampingan pengelolaan usaha pertanian.

Tantangan lain, masih rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian terutama dalam sektor budidaya.

Saat ini usia rata-rata petani sebagian besar diatas usia lima puluh tahun dengan produktivitas yang makin menurun. Apabila tidak ada upaya serius mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian maka sangat mungkin terjadi *lost generation* dalam kurun 10-15 tahun kedepan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo kedepan dapat digali dari potensi objektif Kabupaten Wonosobo yang memiliki keragaman sumber daya hayati cukup tinggi. Potensi komoditas pertanian yang cukup beragam memungkinkan pengembangan sentra-sentra komoditas. Dengan kondisi ketinggian lahan yang cukup beragam dari sekitar 200 mdpl sampai hampir 2000 mdpl memungkinkan banyak komoditas yang bisa dikembangkan di Kabupaten Wonosobo menjadi komoditas-komoditas unggulan.

Pengembangan pertanian terpadu juga menjadi salah satu peluang pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo kedepan. Dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi hijauan pakan ternak yang cukup tinggi. Pengembangan budidaya peternakan selain akan dapat meningkatkan populasi dan produk pertanian juga menyediakan hasil sampingan berupa sumber pupuk organik untuk budidaya peternakan. Optimalisasi pemanfaatan limbah peternakan dapat diarahkan untuk penurunan biaya pokok produksi pertanian dan *recovery* lahan-lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang.

Peningkatan akses petani pada sumber benih/bibit yang berkualitas menjadi salah satu peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo kedepan. Kondisi lahan pertanian yang merentang dari dataran rendah sampai dataran tinggi juga potensial untuk riset dan pengembangan sumber benih/ bibit baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Dalam proses produksi/budidaya sumber benih/bibit mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam menghasilkan kualitas maupun kuantitas produk pertanian. Peningkatan akses petani pada sumber benih/bibit yang berkualitas menjadi salah satu peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo kedepan.

Pengembangan mekanisasi pertanian juga menjadi salah

satu peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Biaya tenaga kerja yang cukup tinggi karena kelangkaan dan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menjadi permasalahan dalam budidaya pertanian. Mekanisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna menjadi salah satu alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Meskipun sampai saat ini fasilitasi alat dan mesin pertanian sudah banyak dilakukan tetapi efektivitasnya dilapangan masih belum seperti yang diharapkan. Kekurangesuaian dengan kondisi lahan di Kabupaten Wonosobo maupun keterbatasan kemampuan operator alat menjadikan pemanfaatannya kurang optimal.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu periode 2016 – 2021. Karenanya, untuk penyusunan perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan yang lebih baik kedepan, perlu dilakukan pencermatan terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di masa yang akan datang khususnya antara lain, menurunnya daya dukung lingkungan pertanian, perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, ketersediaan lahan dan sumber air pertanian, kepemilikan lahan, akses petani terhadap sarana produksi dan akses pasar, kelembagaan petani dan penyuluh serta keterpaduan antar sektor.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan harus terpenuhi karena merupakan hak dasar manusia yang dijamin di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan urusan bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan bidang urusan yang diampu dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel. 3.1.

## Isu Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

<b>Isu Strategis</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>Urusan Pangan</b>			
Masih panjangnya saluran distribusi pangan	Masih terjadi ketidak stabilan ketersediaan maupun harga bahan pangan	Disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di produsen dengan harga di konsumen	Produsen bahan pangan (petani/peternak) tidak memiliki jaringan pemasaran untuk mengurangi rantai distribusi yang panjang
Masih beredarnya pangan non ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	Kesadaran terhadap pangan yang Asuh masih rendah	Aspek keamanan kesehatan, keutuhan maupun kehalalan belum menjadi pertimbangan utama sebagian pelaku pangan dan sebagian masyarakat selaku konsumen	Tren dan harga bahan pangan masih sering menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha pangan maupun masyarakat sebagai konsumen
<b>Urusan Perikanan</b>			

Masih rendahnya produksi ikan budidaya	Budidaya perikanan belum dilakukan secara intensif	Masih rendahnya kemampuan pembudidaya ikan untuk mengakses benih dan pakan yang berkualitas	Sebagian besar usaha budidaya ikan masih menjadi usaha sampingan
Minimnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi secara kontinyu	Sebagian besar UPR belum mampu memproduksi benih dengan kontinuitas, kuantitas dan kualitas yang baik	Sebagian besar UPR belum menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Keterbatasan prasarana budidaya dan sumber benih/ indukan yang berkualitas
Minimnya penerapan teknologi perikanan	Masih terbatasnya pengetahuan teknologi perikanan di masyarakat	Masih kurangnya edukasi penerapan teknologi perikanan	Terbatasnya SDM perikanan yang ada di Kabupaten Wonosobo
<b>Urusan Pertanian</b>			

Belum optimalnya kelembagaan petani	Banyak kelompok tani yang tidak aktif setelah terbentuk.	Sebagian kelompok tani pembentukannya bukan didasari kebutuhan anggotanya tetapi lebih sebagai pemenuhan persyaratan administrasi.	Fasilitasi/bantuan pemerintah mensyaratkan/ hanya bisa disalurkan melalui kelompok.
Masih minimnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi/terstandarisasi	Proses sertifikasi/standarisasi produk pertanian bagi petani masih cukup merepotkan	Sebagian besar petani belum menyadari arti penting sertifikasi/standarisasi produk pertanian	Petani belum mendapatkan nilai tambah dari produk yang tersertifikasi/terstandarisasi
Menurunnya kualitas genetik ternak asli Wonosobo	Perkawinan silang dengan domba lokal.	Peternak kesulitan mendapatkan bibit Domba Wonosobo yang bagus.	Harga indukan yang bagus (betina maupun jantan) jumlahnya terbatas dan harganya relatif tinggi

Masih tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia	Pupuk kimia dianggap mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan dan mudah dalam aplikasinya.	Sebagian besar petani belum percaya terhadap penggunaan pupuk ramah lingkungan/ organik dalam budidaya.	Sebagian besar petani hanya berorientasi pada produktivitas dalam budidayanya.
Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian	Sebagian besar petani tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penanganan pasca panen	Untuk melakukan penanganan pasca panen dibutuhkan sarana prasarana dan biaya tambahan.	Sebagian besar petani tidak memiliki sarana prasarana dalam penanganan pasca panen.
Belum optimalnya penggunaan teknologi /inovasi pertanian	Teknologi pertanian yang ada sering kurang efektif dalam implementasi di lapangan	Ketidaksesuaian dengan kondisi geografis dan kapasitas usaha sebagian besar petani	Mobilisasi teknologi pertanian ke lahan budidaya sulit dan kepemilikan lahan rata-rata relatif petani sempit.

Sumber: Diolah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Wonosobo

### **Urusan Bidang Pangan:**

1. Masih panjangnya saluran distribusi pangan menjadi salah satu isu strategis urusan pangan di Kabupaten Wonosobo. Panjangnya rantai distribusi menyebabkan banyak pihak yang terkait dalam distribusi bahan pangan. Semakin panjang rantai distribusi selain berakibat pada tingginya disparitas harga di produsen dengan harga yang harus dibayar konsumen juga menyebabkan potensi penyimpangan bisa terjadi di banyak titik. Terutama jika terjadi kelangkaan bahan pangan. Praktik menahan atau menimbun bahan pangan bisa terjadi pada beberapa level distribusi. Akibatnya stabilitas pasokan bahan pangan rentan terganggu. Terutama untuk komoditas bahan pangan strategis yang sumbernya berasal dari luar wilayah Kabupaten Wonosobo. Salah satu penyebab utama panjangnya rantai distribusi adalah masih rendahnya kemampuan petani/peternak untuk mendelevery bahan pangan yang dihasilkan sampai ke level konsumen. Sebagian besar petani sampai saat ini masih berhenti pada tahap budidaya masih sangat jarang yang mempunyai kemampuan untuk menjual langsung sampai ke konsumen. Bahan pangan strategis seperti beras misalnya, masih banyak petani yang menjual dalam bentuk gabah kering panen.
2. Masih beredarnya pangan non ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) merupakan isu strategis pada pelaksanaan urusan pangan di Kabupaten Wonosobo. Kesadaran yang masih rendah terhap pentingnya pangan yang ASUH, tidak hanya pada masyarakat selaku konsumen tetapi juga terjadi pada pelaku usaha pangan baik pada level produsen maupun level distributor. Melalui pengawasan yang dilakukan selama ini, terutama pada momen-momen tertentu masih ditemukan adanya penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan. Penggunaan bahan tambahan berbahaya yang digunakan sebagai pewarna, penyedap, pemanis maupun pengawet masih didapati pada bahan pangan yang berasal dari pabrikan maupun yang berasal dari industri rumah tangga dengan skala usaha mikro. Harga jual produk bagi produsen maupun harga beli produk bagi konsumen menjadi penyebab penggunaan bahan tambahan berbahaya masih terjadi.

### **Urusan Bidang Perikanan:**

1. Masih rendahnya produksi ikan budidaya merupakan salah satu isu strategis pelaksanaan urusan perikanan di Kabupaten Wonosobo. Sebagian besar produksi perikanan budidaya saat ini berasal dari budidaya yang dilakukan di Waduk Wadaslintang. Baik budidaya yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan pembudidaya perorangan dengan keramba apung. Sedangkan untuk budidaya perkolaman dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah kecamatan. Diantaranya di Wilayah Kecamatan Kertek, Kalikajar, Selomerto, Leksono, Wonosobo, Mojotengah dan Garung. Sedangkan untuk di wilayah kecamatan lain ada tetapi dalam jumlah relatif sedikit. Pengelolaan budidaya perikanan ini sebagian besar masih belum dilakukan secara intensif. Pengelolaan yang belum intensif ini bisa dilihat dari pemilihan benih yang belum terlalu memperhatikan kualitas sumber benih, pemberian pakan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan, jangka waktu pemeliharaan yang cukup panjang dengan frekuensi panen hanya 1-2 kali dalam setahun. Hal tersebut terjadi karena budidaya ikan Sebagian besar masih menjadi usaha sampingan bagi masyarakat. Masih sangat sedikit yang menjadikan budidaya ikan konsumsi sebagai sumber pendapatan utama.
2. Minimnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi secara kontinyu menjadi salah satu isu strategis urusan perikanan di Kabupaten Wonosobo. Sampai saat ini sebagian kebutuhan benih ikan masih dipenuhi dari luar wilayah seperti Magelang atau Banjarnegara maupun dari wilayah lain. Sebagian besar UPR yang ada saat ini belum mampu menjaga kontinuitas, kuantitas dan kualitas benihnya. Dalam usaha pembenihan yang dilakukan Sebagian besar UPR belum menerapkan kaidah-kaidah cara pembenihan ikan yang baik (CPIB). Keterbatasan sarana prasarana dan masih rendahnya akses sebagian besar UPR pada sumber benih yang berkualitas menjadi salah satu penyebab mereka belum bisa menerapkan pembenihan sesuai kaidah pembenihan ikan yang baik.
3. Minimnya penerapan teknologi perikanan juga menjadi isu strategis pelaksanaan urusan perikanan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam penerapan teknologi perikanan

relatif masih terbatas. Meskipun saat dengan berkembangnya teknologi informasi yang cukup pesat masyarakat makin mudah dalam mengakses informasi terkait teknologi perikanan, tetapi sampai pada proses penerapan masih banyak tantangannya. Terutama terkait sumber daya yang dimiliki. Dalam kondisi tersebut edukasi dalam penerapan teknologi perikanan masih sangat diperlukan. Sayangnya, dengan keterbatasan sumber daya yang ada saat ini edukasi tersebut belum dapat dilakukan secara optimal.

### **Urusan Bidang Pertanian**

1. Belum optimalnya kelembagaan petani merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan urusan bidang pertanian di Kabupaten Wonosobo yang masih harus diperhatikan dalam beberapa tahun kedepan. Kelembagaan petani yang saat ini ada baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun kelompok Wanita Tani (KWT) sebagian besar belum optimal sebagai salah instrumen dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo. Tidak sedikit kelompok tani yang tidak aktif setelah dibentuk. Karena pembentukannya tidak didasari dari kebutuhan atau keinginan anggotanya untuk berkelompok baik dalam wadah kelompok tani maupun KWT. Banyak kelompok yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan administrasi guna mendapatkan fasilitasi/ bantuan dari pemerintah.
2. Masih minimnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi/terstandarisasi. Dalam kurun lima tahun terakhir produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi cenderung stagnan. Bagi sebagian besar petani proses sertifikasi/standarisasi produk pertanian masih menjadi proses yang merepotkan bagi mereka. Banyak petani yang belum menyadari arti penting sertifikasi produk pertanian, perkebunan atau peternakan yang mereka hasilkan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari orientasi pemasaran produk pertanian, perkebunan maupun peternakan yang masih berorientasi pada pasar tradisional/ konvensional. Sehingga mereka belum memperoleh nilai tambah dari sertifikasi/ standarisasi produk yang mereka hasilkan.
3. Menurunnya kualitas genetik ternak asli Wonosobo. Di sub sektor peternakan Kabupaten Wonosobo memiliki sumber daya

genetik hayati (SDGH) Domba Wonosobo yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kualitas genetic dan populasinya. Meskipun belum dilakukan grading secara intensif terhadap Domba Wonosobo, namun diketahui jika ada kecenderungan terjadinya penurunan kualitas genetik Domba Wonosobo. Perkawinan silang dengan domba lokal (kacang) menjadi penyebab utama penurunan kualitas genetik tersebut. Pengiriman Domba Wonosobo ke luar daerah secara besar-besaran dalam decade sebelumnya menjadikan ketersediaan indukan maupun pejantan Domba Wonosobo dengan kualitas yang baik makin sulit diperoleh oleh peternak. Kalaupun saat ini masih ada dalam jumlah yang relatif terbatas dengan harga yang relatif tinggi bagi ukuran peternak tradisional di Kabupaten Wonosobo.

4. Masih tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia. Tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia paling tidak akan berdampak pada dua hal. Pertama, menurunnya kemandirian petani dalam pemenuhan sarana produksi yang ini akan berpengaruh pada keberlangsungan petani dalam berbudidaya. Kedua, menurunnya daya dukung lingkungan (kesuburan lahan) terhadap budidaya pertanian dalam jangka panjang. Bagi petani, ketergantungan terhadap pupuk kimia ini terjadi karena selama ini pupuk kimia relatif mudah diperoleh oleh petani dibanding dengan pupuk non kimia. Pupuk kimia juga dinilai lebih efisien dalam transportasi maupun aplikasinya. Karena selama ini Sebagian besar petani hanya berorientasi pada produktivitas dan biaya produksi dalam budidaya pertanian.
5. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian. Sebagian besar petani di Kabupaten Wonosobo menjual hasil produk pertanian dalam bentuk barang mentah atau segar. Harus diakui sebagian besar petani tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penanganan pasca panen dengan baik. Karena untuk melakukan penanganan pasca panen dibutuhkan sarana prasarana dan biaya tambahan. Penanganan pasca panen, apalagi sampai pada tahap pengolahan sering kali menjadi kurang efektif dengan kapasitas kecil yang dihasilkan rata-rata petani di Kabupaten Wonosobo. Sementara, petani perlu segera mendapatkan modal untuk melakukan budidaya lagi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil

panennya.

6. Belum optimalnya penggunaan teknologi /inovasi pertanian. Pengembangan teknologi pertanian yang aplikatif kedepan menjadi salah satu kebutuhan untuk keberlangsungan usaha pertanian. Sampai saat ini penggunaan teknologi/ inovasi pertanian belum optimal karena teknologi pertanian yang ada sering kurang efektif dalam implementasi di lapangan. Ada ketidaksesuaian dengan kondisi geografis dan kapasitas usaha sebagian besar petani di Kabupaten Wonosobo. Dengan kondisi geografis yang berlereng dan kepemilikan lahan rata-rata hanya 0,2-0,3 hektar menjadikan mobilisasi teknologi pertanian yang ada saat ini sering menjadi kurang efektif.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam jangka lima tahun ke depan, Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo telah menetapkan Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah **“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**. Visi tersebut menjadi ruh bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo dan arah bagi semua komponen pembangunan yang ada di Wonosobo. Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2021-2026, secara ringkas konsep dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Berdaya saing:**

Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.

#### **2. Maju:**

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.

### **3. Sejahtera:**

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo lima tahun kedepan, akan ditempuh melalui lima misi yang meliputi:

1. mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Dari kelima misi tersebut, misi yang kedua yakni meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misinya, Bupati Wonosobo menetapkan lima program unggulan yang meliputi: Wonosobo Makmur, Wonosobo Sehat, Wonosobo Pinter, Wonosobo Aman dan Wonosobo Makmur. Dari kelima program unggulan tersebut, Program Wonosobo Makmur merupakan program unggulan yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo periode 2021-2026, Program Wonosobo Makmur merupakan program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Kabupaten Wonosobo. Program tersebut akan diimplementasikan dengan cara:

1. Menurunkan biaya produksi melalui inovasi dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan dengan mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan antara sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta mengoptimalkan penggunaan limbah melalui penerapan inovasi/TTG ramah lingkungan untuk menghasilkan bibit/benih unggul, pupuk organik, sistem budidaya organik/non pestisida.
2. Pengembangan subsidi bagi petani melalui:
  - a. subsidi input merupakan program untuk menjaga kualitas/mutu komoditas pertanian agar mempunyai daya saing melalui peningkatan akses saprodi unggul ramah lingkungan baik pupuk, bibit maupun benih komoditas pertanian.
  - b. subsidi output merupakan program untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pemasaran produk pertanian melalui fasilitasi pemasaran luar daerah, pemasaran online, pembelian langsung oleh ASN.
  - c. jaminan gagal panen bagi petani diperuntukkan bagi petani yang mengalami resiko gagal panen karena bencana alam, serangan hama/penyakit dan gangguan lainnya.

**Tupoksi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang terkait dengan Visi Misi Bupati:**

Dalam program unggulan “*Wonosobo Makmur*” sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo isu penurunan biaya pokok produksi merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Merujuk pada hasil identifikasi permasalahan sektor pertanian, tingginya biaya produksi dipengaruhi terutama oleh dua komponen yaitu kenaikan biaya tenaga kerja dan kenaikan sarana produksi pertanian. Kedua hal tersebut terkait erat dengan proses budidaya pertanian di Kabupaten Wonosobo dimana salah satu tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo adalah Pembinaan Produksi di Bidang Pertanian dan Perikanan.

Sedangkan untuk penerapan teknologi pertanian tepat guna dengan konsep pengembangan pertanian terpadu yang ramah lingkungan sebagai upaya penurunan biaya tenaga kerja terkait erat dengan tugas penataan sarana dan prasarana pertanian, pangan dan perikanan serta tugas Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan.

Untuk pengembangan subsidi input dan subsidi *out put* yang juga sebagai implementasi Program Wonosobo Makmur terkait dengan beberapa tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yaitu: Penataan sarana dan prasarana pertanian, pangan dan perikanan, Pengawasan mutu dan peredaran pangan, benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan, Pengawasan peredaran sarana pertanian, pangan dan perikanan, Pengendalian dan penanggulangan bencana alam lingkup pertanian, pangan dan perikanan, Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan dan tugas Pembina dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan.

#### **Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati**

Identifikasi terhadap faktor penghambat pencapaian sasaran program unggulan bupati yaitu meningkatnya kesejahteraan petani sebagai penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Sempitnya luas kepemilikan lahan pertanian rata-rata rumah tangga tani di Kabupaten Wonosobo yang hanya 0,2 – 0,3 hektar.
- Ketergantungan petani yang cukup besar terhadap sarana produksi dari pabrikan. Topografi lahan yang sebagian besar berupa terasiring menjadikan pemanfaatan teknologi pertanian yang ada kurang efektif dan efisien.
- Masih rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur), sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi dan pasca panen. Termasuk sarana pengembangan perikanan yang terkait ketersediaan benih dan pakan ikan.
- Penguasaan teknologi pertanian yang masih rendah sehingga produktivitasnya menjadi rendah.
- Sarana pertanian dan perikanan yang berasal dari luar wilayah masih cukup tinggi.
- Penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal.

- Pertumbuhan produksi masih fluktuatif karena belum banyak petani yang mengikuti pola tanam . Sebagian justeru mengikuti tren pasar yang sangat fluktuatif.
- Pemilikan modal Sebagian besar petani relatif masih kecil.
- Kelembagaan petani masih lemah dan belum optimal dalam peningkatan kapasitas usaha tani.

Identifikasi terhadap faktor pendukung pencapaian sasaran program unggulan bupati yaitu meningkatnya kesejahteraan petani sebagai penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk.
- Keragaman komoditas yang dapat dibudidayakan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- Kualitas sebagian komoditas yang sudah cukup dikenal pasar.
- Jumlah rumah tangga petani yang masih cukup besar.
- Fasilitasi bantuan sarana prasarana dari pemerintah.
- Kecenderungan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Adanya komitmen pemerintah daerah untuk memajukan sector pertanian sebagai sektor unggulan.
- Kabupaten Wonosobo sebagai daerah wisata yang memungkinkan untuk pengembangan agrowisata dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,,

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

**Tabel. 3.2 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

<b>Misi Kementan RI</b>	<b>RPJMD Kab. Wonosobo</b>	<b>Strategi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan ketahanan pangan</li> <li>2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kementerian pertanian.</li> </ol>	<p>Misi II: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi</p>	<p>Mewujudkan ketahanan pangan. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan</p>

*Sumber: Renstra Kementerian Pertanian RI periode Tahun 2020-2024*

Merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian, pembangunan pertanian akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Hal tersebut selaras dengan salah satu Misi Bupati Wonosobo yakni Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tangguh untuk Mengurangi Kemiskinan yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi” dengan program unggulan Wonosobo Makmur dimana sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Kabupaten Wonosobo. Sehingga Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam Menyusun Renstara 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dan diselaraskan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

### **3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan pertanian kedepan selalu tidak dapat dipisahkan dari kondisi tata ruang di Wilayah Kabupaten Wonosobo. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian terkait

erat dengan lahan kondisi objektif ketersediaan lahan budidaya baik luasan maupun kesuburannya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dalam tahun-tahun kedepan masih akan terus terjadi. Bertambahnya jumlah penduduk disatu sisi membutuhkan lahan untuk pemukiman/ tempat tinggal yang berarti lahan-lahan untuk pertanian akan semakin berkurang. Disisi lain bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan terhadap pangan akan meningkat.

Selain faktor makin berkurangnya lahan pertanian, dalam isu lingkungan hidup strategis juga dihadapkan dengan kondisi makin menurunnya kualitas lahan pertanian karena penggunaan pupuk kimia dalam jangka Panjang. Sementara untuk pengembangan pertanian organik/ramah lingkungan masih belum berkembang. Bahkan dari kajian lingkungan hidup strategis di Kabupaten Wonosobo, budidaya pertanian saat ini berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Identifikasi faktor penghambat pencapaian pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan ditinjau dari tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis meliputi:

- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- Belum optimalnya pengembangan kawasan/ sentra budidaya pertanian;
- Berkurangnya sumber-sumber air untuk pertanian maupun perikanan;
- Pencemaran tanah maupun air baik karena proses budidaya pertanian maupun akibat dari aktivitas masyarakat lainnya;
- Identifikasi faktor pendorong pencapaian pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan ditinjau dari tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis meliputi;
- Pemetaan lahan dan rencana penetapan LP2B yang sudah dilakukan mulai tahun 2021;
- Kerjasama pemanfaatan lahan-lahan perhutani untuk budidaya pertanian/perkebunan;
- Pembangunan prasarana pertanian dikawasan sentra produksi pertanian;

### **3.5 Penentuan Isu-Isu strategis**

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Wonosobo, dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya semakin menurun dan laju

pertumbuhannya terendah dibandingkan sektor lainnya. Terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan kedepan yang perlu mendapat prioritas sebagai isu strategis jangka menengah/ lima tahun kedepan yaitu:

**Urusan Pangan**

- Masih panjangnya saluran distribusi pangan
- Masih beredarnya pangan non ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)

**Urusan Perikanan**

- Masih rendahnya produksi ikan budidaya
- Minimnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi secara kontinyu
- Minimnya penerapan teknologi perikanan

**Urusan Pertanian**

- Belum optimalnya kelembagaan petani
- Masih minimnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi/terstandarisasi
- Menurunnya kualitas genetik ternak asli Wonosobo
- Masih tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia
- Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian
- Belum optimalnya penggunaan teknologi /inovasi pertanian

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tindak lanjut dari Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 merupakan upaya mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Selanjutnya penjabaran dari Visi dan Misi tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian sebagai tabel berikut:

Tabel. 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Wonosobo	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian Kabupaten Wonosobo	Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	3,50-5,00	3,50-5,00	3,00-3,40	3,00-3,40	2,00-4,00	2,00-4,00
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74,9	75	75,1	75,25	75,35	75,45
		Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50	75,6	75,7	75,8	75,9	76

		Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat konsumsi komoditas ikan per kapita per tahun (kg)	27,78	30,64	32,83	35,01	37,20	39,39
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor PPH	87,32	87,32	87,53	87,68	87,83	87,98
2.	Meningkatkan akses petani miskin/ buruh tani terhadap ekonomi produktif	Meningkatnya jumlah petani ruta miskin yang dibina	Pertumbuhan petani ruta miskin yang dibina	25,00	20,00	16,67	14,29	12,50	11,11

Sumber: RPJMD Kabupaten Wonosobo periode Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat dua tujuan dalam pembangunan jangka menengah yang terkait dengan tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan urusan yang diampu. Tujuan pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor partanian Kabupaten Wonosobo dengan lima sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang diukur dari laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB.
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang diukur dari capaian nilai SAKIP. Dalam lima tahun kedepan ditargetkan mengalami peningkatan capaian dari kondisi awal (base line) Tahun 2020 sebesar 74,88 menjadi 75,45 pada Tahun 2026.
3. Meningkatnya pelayanan publik yang diukur dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada sasaran ini ditargetkan pada akhir Tahun 2026 mencapai 76 meningkat dari 75,45 pada Tahun 2020.
4. Meningkatnya tingkat konsumsi komoditas ikan masyarakat Kabupaten Wonosobo dari 22,17 pada Tahun 2020 menjadi 39,39 pada akhir Tahun 2026.
5. Meningkatnya skor PPH yang merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dalam jangka lima tahun kedepan skor PPH Kabupaten Wonosobo ditargetkan meningkat dari 86,80 pada akhir Tahun 2020 menjadi 87,98 pada akhir Tahun 2026.

Tujuan kedua, meningkatkan akses petani miskin/ buruh tani terhadap ekonomi produktif dengan sasaran meningkatnya jumlah petani ruta miskin yang dibina. Sasaran ini akan diukur dari pertumbuhan petani ruta miskin yang dibina sampai akhir 2026 dengan target capaian sebesar 11,11 persen dari kondisi awal Tahun 2020 sebesar 33,33 persen.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pada RPJMD tahun 2021-2026, serta kondisi umum saat ini, maka ditetapkan strategi dan arah Kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun kedepan sebagai tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel. 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi	:	Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera		
Misi	:	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tangguh untuk mengurangi Kemiskinan yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan	Penguatan kelembagaan dan kapasitas petani	
			Peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	
			Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan dan peternakan	
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan	Peningkatan SDM dan teknologi perikanan	

			Peningkatan sarpras, budidaya dan produksi perikanan
		Mewujudkan ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan
Meningkatkan akses petani miskin/ buruh tani terhadap ekonomi produktif	Meningkatnya jumlah petani ruta miskin yang dibina	Meningkatkan produktivitas petani ruta miskin/buruh tani	Peningkatan keterampilan petani ruta miskin/buruh tani
			Peningkatan partisipasi petani ruta miskin/buruh tani dalam kelembagaan petani

Arah kebijakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas petani akan dilakukan untuk mendorong tumbuhnya kelompok usaha pertanian. Sebagaimana diketahui sampai saat ini kelembagaan petani yang ada baik kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan) maupun kelompok wanita tani (KWT) belum secara signifikan berpengaruh terhadap produktivitas maupun kesejahteraan petani. Dalam melakukan usaha di sektor pertanian masih dilakukan secara individual, sehingga kapasitas usaha petani relatif masih lemah. Secara bertahap Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan akan berupaya untuk melakukan revitalisasi terhadap kelompok tani kearah kelompok usaha/ kelompok ekonomi produktif pertanian. Hal ini dilakukan untuk menguatkan petani secara kolektif baik dalam budidaya dan pengelolaan usaha tani, pasca panen maupun pemasaran hasil-hasil pertanian.

Peningkatan akses sarana produksi pertanian akan ditempuh melalui prioritas peningkatan akses pada benih/bibit yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan balai benih, baik balai benih ikan maupun balai benih pertanian yang ada di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga dengan mengembangkan sumber benih/ bibit di tingkat petani melalui penangkar maupun unit perbenihan rakyat.

Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan dan peternakan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan *good agriculture practice* maupun melalui demplot sebagai model pengembangan inovasi pertanian. Termasuk fasilitasi untuk ujicoba pertanian ramah lingkungan.

Peningkatan SDM dan teknologi perikanan dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan cara pembudidayaan maupun pembenihan ikan yang baik. Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan akses bagi UPR terhadap indukan unggul/bersertifikat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas hasil perikanan baik berupa benih ikan maupun ikan konsumsi. Penggunaan teknologi perikanan juga dilakukan dengan fasilitasi peralatan bagi kelompok nelayan baik dalam penangkapan maupun upaya pelestarian sumber daya perikanan di perairan umum. Terkait dengan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya prioritasnya akan dilakukan dengan peningkatan kemandirian pakan melalui inisiasi pembuatan pakan/pellet untuk menekan biaya produksi perikanan.

Peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan akan dilakukan dengan kegiatan untuk penanganan daerah rawan pangan melalui kegiatan penyediaan infrastruktur ketahanan pangan (lambung pangan), Desa mandiri pangan maupun kegiatan untuk peningkatan keanekaragaman pangan berbasis bahan pangan lokal. Untuk keamanan pangan secara periodik akan dilakukan kegiatan pengawasan terutama pada jaringan distribusi bahan pangan. Selain itu juga edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan akan terus dilakukan dengan melibatkan *stake holder* terkait.

Peningkatan keterampilan petani ruta miskin/buruh tani akan dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dengan memperhatikan kesesuaian latar belakang masing-masing rumah tangga baik dalam penyelenggaraan sekolah lapang atau lainnya. Sedangkan untuk Peningkatan partisipasi petani ruta miskin/buruh tani dalam kelembagaan petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dengan mendorong masuknya rumah tangga miskin dalam kelompok tani.

Secara umum kebijakan pembangunan pertanian dalam lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan di atas merupakan upaya untuk mendukung capaian program unggulan kepala

daerah terpilih yaitu “Wonosobo Makmur” sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah - langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Program / Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo diimplementasikan kedalam program pembangunan pangan, pertanian dan perikanan guna mewujudkan:

1. peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan
2. peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan
3. ketahanan pangan

Adapun rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo periode 2021 – 2026 kedepan dengan rincian pada Lampiran 1.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program pembangunan Kabupaten Wonosobo yang termuat dalam RPJMD 2021-2026 diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Rencana Kinerja Penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7.1.

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Gapoktan aktif	N/ A	30,89	35,30	40,00	50,00	65,00	75,00	75,00
Persentase kelompok tani aktif	N/ A	50,32	55,28	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Jumlah produksi tanaman pangan (ton/ha)								
- Padi	161.084	161.966	162.016	162.076	162.126	162.176	162.226	162.226
- Jagung	72.557	74.008	75.488	76.990	78.529	80.099	80.179	80.179
- Ubi kayu	139.860	144.055	146.936	149.874	152.871	155.838	158.954	158.954
- Ubi jalar	15.726	16.355	17.009	17.519	18.044	18.585	18.956	18.956
Jumlah produksi hortikultura (Ton)								
- Bawang putih	3.502	3.512	3.582	3.653	3.690	3.727	3.764	3.764
- Kentang	53.372	53.426	53.479	53.532	53.577	53.636	53.684	53.684

- Kubis	58.624	58.681	58.740	58.798	58.857	58.916	58.975	58.975
- Sawi	10.829	10.879	10.929	10.979	11.039	11.089	11.029	11.029
- Bawang daun	36.083	36.103	36.132	36.153	36.153	36.183	36.214	36.214
- Cabe	21.636	21.685	21.725	21.754	21.773	21.785	21.796	21.796
- Durian	14.532	15.935	16.094	16.416	16.744	17.079	17.421	17.421
- Salak	54.928	55.426	55.918	56.412	56.932	57.430	57.892	57.892
- Duku/langsat	4.288	4.416	4.460	4.505	4.552	4.596	46.003	46.003
- Manggis	883	910	937	965	994	1.024	1.055	1.055
- Nangka	5.328	5.377	5.425	5.475	5.523	5.573	5.624	5.624
- Pisang	44.041	44.924	45.823	46.739	47.674	48.627	49.600	49.600
- Pepaya	4.315	4.531	4.757	4.995	5.245	5.507	5.782	5.782
- Nanas	349	356	363	370	378	385	393	393
Jumlah produksi tanaman biofarmaka (Ton)								
- Jahe	117.459	117.577	117.694	117.812	117.929	118.047	118.165	118.165

- Kapulaga	304.717	307.764	310.841	313.950	317.089	320.260	323.463	323.463
Jumlah produksi bunga (tangkai)								
- Krisan	2.556.970	2.582.539	2.608.364	2.634.447	2.660.719	2.687.398	2.714.271	2.714.271
- Mawar	29.540	29.835	30.133	30.434	30.738	31.045	31.355	31.355
Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)								
- Kelapa	4.613.035	4.659.165	4.705.756	4.752.813	4.800.341	4.848.344	4.896.827	4.896.827
- Kopi	521.863	537.518	553.643	570.252	587.359	60.499	623.128	623.128
Jumlah populasi ternak (ekor)								
- Sapi perah	1.447	1.480	1.512	1.519	1.528	1.551	1.574	1.574
- Sapi potong	21.128	2.165	21.933	22.043	22.173	22.505	22.843	22.843
- Kambing	191.160	197.200	200.369	203.374	206.425	209.521	212.664	212.664
- Domba	112.911	112.976	112.985	113.111	113.246	113.588	115.292	115.292
- Unggas	2.579.785	2.840.362	2.903.653	2.934.076	2.978.083	3.022.757	3.068.099	3.068.099
- Kelinci	50.655	51.200	51.583	52.357	53.142	53.940	54.749	54.749

Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	4.565	6.000	7.000	8.500	10.000	12.500	14.000	14.000
Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	19,00	25,00	30,00	35,00	40,00	55,00	60,00	60,00
Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	N/ A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Persentase JUT yang berada di sentra produksi	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00
Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	6,67	10,00	16,66	23,33	33,33	36,67	40,00	40,00

Persentase tempat pemotongan hewan yang terstandar	30,00	32,00	34,00	37,00	42,00	48,00	50,00	50,00
Persentase usaha pertanian yang berizin	N/ A	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
Persentase kelompok tani ikan yang aktif	68,20	70,00	79,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
Persentase UPR aktif	82,69	83,65	84,62	85,58	86,54	87,50	88,46	88,46
Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	-21,49	-10,00	-2,00	2,00	4,00	5,00	6,00	6,00
Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	-0,65	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,60
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	-5,68	0,31	2,40	2,80	2,95	3,10	3,25	3,25
	-5,68	0,31	2,40	2,80	2,95	3,10	3,25	3,25
Rasio desa berlumbung pangan	10,00	6,80	6,80	7,50	9,00	12,00	15,00	15,00
Persentase desa mandiri pangan	15,09	15,80	17,30	19,20	21,10	23,30	26,40	26,40
Persentase bahan pangan ASUH	87,00	88,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Ketersediaan pangan per kapita/ hari	2.875,00	2.880,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Persentase cadangan pangan utama (beras)	259,00	264,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Persentase desa berstatus rawan pangan	50,00	49,00	47,00	43,00	39,00	32,00	26,00	26,00

Persentase rumah tangga miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	N/ A	25,00	32,00	40,00	48,00	57,00	60,00	60,00
Persentase petani rumah tangga miskin yang menjadi anggota kelompok tani	N/ A	N/ A	2,00	3,00	4,00	5,00	10,00	10,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan yang diampu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Sasaran program dan kegiatan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian saran, program dan kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Wonosobo.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama adalah dokumen renstra ini akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja/RKA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan yang diampu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKJIP) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Laporan kinerja tersebut akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kedepan.

Akhirnya, semangat dan komitmen untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ini.

# Lampiran

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Wonosobo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan				Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB																
	Meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian			Produktivitas sektor pertanian																
			3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase gapoktan aktif	30	35	125.000	39	101.685	43	101.895	46	102.585	50	103.162					
				Persentase kelompok tani aktif	52	55		58		60		63		65						
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																	
			Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			3 kelembagaan	50.000			3 kelembagaan	50.000	3 kelembagaan	50.000	3 kelembagaan	50.000					
			Sub. Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Paket		50.000	2 Paket	50.000									
			Sub. Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			3 Unit	75.000	2 Unit	50.000			2 Unit	50.000	2 Unit	50.000					
			3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tanaman pangan			3.155.000		2.592.483			2.597.923		2.615.439		26.350.158	26.350.158			
				- Padi	161.084	162.016		162.076		162.126		162.176		162.226		162.226				
				- Jagung	72.557	75.488		76.990		78.529		80.099		80.179		80.179				
				- Ubi kayu	139.860	146.936		149.874		152.871		155.838		158.954		158.954				
				- Ubi jalar	15.726	17.009		17.519		18.044		18.585		18.956		18.956				
				Produksi tanaman hortikultura																
				- Bawang putih	35.016	35.818		36.534		36.899		37.267		37.639		37.639				
				- Kentang	533.722	534.789		535.323		535.768		536.363		536.839		536.839				
				- Kubis	586.238	5.873.968		5.879.841		5.885.720		5.891.605		5.897.496		5.897.496				
				- Sawi	108.289	109.288		109.785		110.392		110.887		110.294		110.294				
				- Bawang daun	360.826	361.320		361.530		361.528		361.830		362.136		362.136				
				- Cabe	216.363	217.245		217.540		217.734		217.846		217.960		217.960				
				- Durian	145.322	160.943		164.161		167.444		170.792		174.207		174.207				
				- Salak	549.283	559.175		564.120		569.324		574.296		578.923		578.923				
				- Duku/langsat	42.876	44.602		45.049		45.518		45.956		460.025		460.025				
				- Manggis	8.834	9.370		9.651		9.940		10.238		10.545		10.545				
				- Nangka	53.275	54.250		54.748		55.230		55.725		56.240		56.240				
				- Pisang	440.413	458.225		467.389		476.736		486.270		495.995		495.995				
				- Pepaya	43.148	47.570		49.948		52.445		55.067		57.820		57.820				
				- Nanas	3.490	3.631		3.703		3.776		3.850		3.927		3.927				
				Produksi tanaman biofarmaka																
				- Jahe	1.174.591	1.176.940		1.178.116		1.179.294		1.180.473		1.181.653		1.181.653				
				- Kapulaga	3.047.167	3.108.414		3.139.498		3.170.892		3.202.600		3.234.626		3.234.626				
				Produksi bunga																
				- Krisan	2.556.970	2.608.364		2.634.447		2.660.719		2.687.398		2.714.271		2.714.271				
				- Mawar	29.540	30.133		30.434		30.738		31.045		31.355		31.355				
				Produksi tanaman perkebunan																
				- Kelapa	4.613.035	4.705.756		4.752.813		4.800.341		4.848.344		4.896.827		4.896.827				
				- Kopi	521.863	553.643		570.252		587.359		60.499		623.128		623.128				
				Populasi ternak																
				- Sapi perah	1.447	1.512		1.519		1.528		1.551		1.574		1.574				
				- Sapi potong	21.128	21.933		22.043		22.173		22.505		22.843		22.843				







			Sub, Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			2 Paket	225.000												
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			5 Kelompok	150.000												
			Sub. Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			1 Paket	200.000			1 Paket	200.000			1 Paket	200.000			1 Paket	200.000
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
			Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Paket	200.000												
			Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Paket	200.000												
			Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			15 Kecamatan	150.000												
			Sub. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan			1 Dokumen	150.000												
			3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap		-5,68	0,31		2,40		2,80		2,95		3,10		3,25		3,25
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
			Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			1 Dokumen	150.000												
	Meningkatnya ketersediaan pangan		2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor PPH															
				Rasio desa berlumbung pangan		10,00	6,80		6,80		7,50		9,00		12,00		15,00		15,00



			Sub. Keg. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia					10 Kelompok	125000	10 Kelompok	150000								
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota																
			Sub. Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					10 Ton	125000	10 Ton	125000	15 Ton	200000						
			2.09.04. Program penanganan kerawanan pangan	Persentase desa berstatus rawan pangan	50,00	49,00		47,00		43,00		39,00		32,00		26,00		26,00	
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan																
			Sub. Keg. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					1 Dokumen	50000										
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					1 Tahun	50000										
Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif				Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat kelompok pendapatan 40 persen terendah															
	Meningkatnya jumlah petani ruta miskin yang dibina			Pertumbuhan petani ruta miskin yang dibina															
			2.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	20,00	25,00		32,00		40,00		48,00		57,00		60,00		60,00	
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			5 Paket	150000	7 Paket	200000										
			2.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	n.a	0,00		2,00		3,00		4,00		5,00		10,00		10,00	
J U M L A H :																			









